

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, namun pada hakekatnya pembangunan hanya ditunjukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Jadi, pembangunan ekonomi dinyatakan berhasil apabila suatu negara dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu aspek yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yaitu derajat pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diamati dengan dilihatnya tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya yang telah tercantum dalam laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP).

United Nation Development Programme (UNDP), mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan bagi manusia yang dilihat sebagai proses pembangunan kemampuan manusia dalam tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas. Demokrasi dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi sebuah pembahasan baru yang berpengaruh dalam keberhasilan

tercapainya pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2017). Sehingga makin disadari bahwa fokus pembangunan harus bertumpu pada manusia itu sendiri.

Nurfitriani (2017) menyatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan manusia dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal juga dengan *Human Development Index* (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah indikator pembangunan yang diprakarsai oleh UNDP (*United Nation Development Programme*). Kehidupan yang lebih baik harus diukur bukan hanya dalam skala ekonomi melainkan juga harus mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti panjangnya umur manusia (*longevity*) sebagai gambaran dari kecukupan nutrisi dalam masyarakat, pendidikan, dan standar hidup layak yang dicerminkan dalam GDP per kapita (Hudiyanto, 2017).

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan melalui tiga pendekatan dimensi dasar :

1. Dimensi Kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup waktu lahir.
2. Dimensi Pendidikan yang dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Dimensi Ekonomi yang dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan, diukur dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk perluasan dan peningkatan ekonomi suatu daerah. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nation Development Programme (UNDP) mengembangkan konsep

pembangunan manusia dan menetapkan peringkat capaian pembangunan manusia sebagai berikut :

1. Rendah : IPM kurang dari 60 poin
2. Sedang : IPM diantara 60 dan 70 poin
3. Tinggi : IPM diantara 70 dan 80 poin
4. Sangat Tinggi : IPM lebih tinggi dari 80 poin

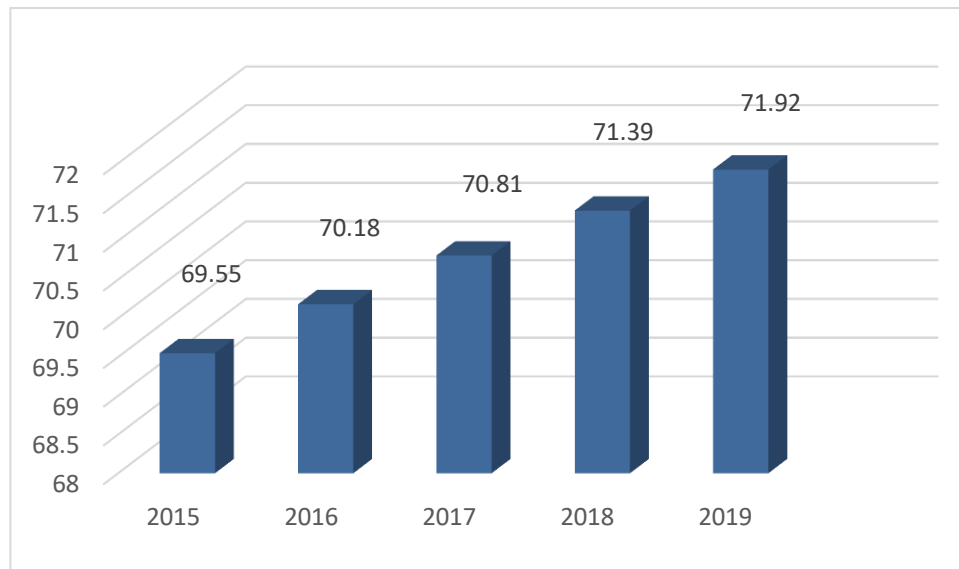
Didalam ayat Al-Quran dan riwayat tabi'in salah satu yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Bahwa pembangunan tidak semata-mata membangun fisik, tetapi juga suatu hal yang bersifat immaterial dan spiritual. Hal ini dapat dibuktikan pada Al-Quran : Surah Al-A'raaf ayat 96:

Artinya: "Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن

كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS Al-A'Raaf : 96).



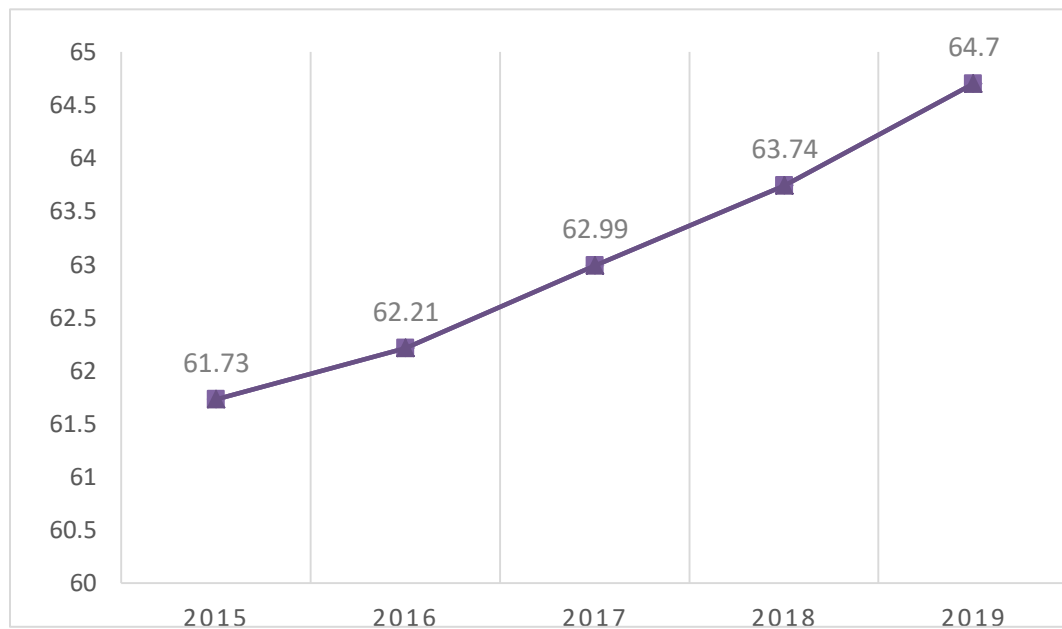
Sumber : Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.1
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
Tahun 2015-2019

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami kondisi yang stabil meningkat pada kurun waktu 2015-2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pada tahun 2015 IPM di Indonesia sebesar 69,55% lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 70,18% selanjutnya pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 70,81% pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 71,39% dan pada tahun 2019 peningkatan IPM menjadi sebesar 71,92%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2015 ke 2016 dan 2016 ke 2017, peningkatannya memiliki nilai yang sama yakni sebesar 0,63%.

Meskipun begitu, tingkat Indeks Pembangunan Manusia perlu diperhatikan disetiap provinsi, mengingat Indonesia memiliki banyak provinsi

yang terpisahkan oleh lautan yang memiliki jarak yang sangat jauh dari pusat kota bisnis yakni ibukota DKI Jakarta. Salah satu provinsi yang jauh dari kota bisnis tersebut adalah provinsi Papua Barat, berikut merupakan kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2019.



Sumber : Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1. 2
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat
Tahun 2015-2019

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat memiliki kondisi yang selalu meningkat pada kurun waktu 2015-2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pada tahun 2015 IPM di Provinsi Papua Barat sebesar 61,73% lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi

62,21% selanjutnya pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 62,99% pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 63,74% dan pada tahun 2019 peningkatan IPM menjadi sebesar 64,7%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 ke 2019 dan, peningkatannya memiliki nilai sebesar 0,96%.

Paradigma pembangunan yang saat ini sedang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan pembangunan manusia dan dapat dilihat dengan kualitas hidup manusia disetiap negara. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya sangat membutuhkan modal manusia yang berkualitas agar dapat bisa menjadi modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas pemerintah dapat bisa memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Adapun kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan yaitu pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian dengan cara menerapkan hidup sehat, pembangunan pendidikan dengan cara arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang (Dewi dkk, 2016).

Meningkatnya PDRB akan mengganti pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang yang berkaitan erat dengan IPM karena adanya daya beli yang termasuk dalam salah satu indikator terhadap IPM yaitu indikator pendapatan. Dengan tingginya produktivitas dan kreativitas maka penduduk dapat mengelola sumber daya yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi (Bhakti dkk, 2017). Semakin tinggi PDRB maka akan semakin makmur kesejahteraannya.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2003). Selama ini kita hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi melalui 1 parameter yaitu Indeks Pertumbuhan Manusia tapi tidak melihat indikator-indikator yang dari IPM sendiri. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi yang selama ini dimimpikan oleh pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang akan mengolah kekayaan alam, barang modal dan investasi disektor produktif seperti pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan dan baru-baru akan meningkatkan stok modal (capital stok). Untuk mengelolah semua itu dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan terlampil, mencapai semua itu kita harus melihat harapan lama sekolah yang di tempuh melalui sekolah-sekolah formal dan program-program kerja, semua itu akan sia-sia kalau indeks harapan hidup yang melemah bisa diartikan masyarakat yang tidak sehat (pramonoe dan soesilowati, 2016).

Tetapi dalam kehidupan nyata tidak semua masyarakat dapat mendapatkan pendidikan, ada beberapa kalangan yang hanya dapat mendapatkan pendidikan dibawah standar minimal pendidikan di Indonesia yaitu minimal 12 tahun. Oleh karena itu pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan dan

dengan sekaligus untuk meningkatkan pendidikan pemerintah mengeluarkan belanja untuk pendidikan.

Faktor selanjutnya yang mampu mempengaruhi IPM adalah tentu saja variabel pendidikan yang diwakili oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS). Karena tujuan pendidikan adalah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan sikap, dan melatih ketrampilan kepada masyarakat agar dapat mandiri mencari pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang maka akan semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang cukup dan hal ini bisa membangun kehidupan yang sejahtera.

Selain pengeluaran pendidikan, peran pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pada pemerintah desa setempat sangat diperlukan. Salah satu bantuan pemerintah pusat pada pemerintah desa adalah dana alokasi khusus (DAK). Penggunaan DAK ditujukan untuk latihan usaha untuk kemajuan, perolehan, peningkatan, dan perbaikan kantor dan yayasan yang sebenarnya dengan umur keuangan yang panjang, termasuk pengaturan kantor-kantor pendukung yang sebenarnya. Penggunaan dan pemanfaatan DAK merupakan elemen penting dalam program kemajuan daerah. Adanya kemajuan di daerah-daerah sebenarnya akan ingin mendesak legislatif di sekitarnya untuk bekerja pada sifat perbaikan manusia yang akibatnya diatur untuk bantuan pemerintah publik. Jika DAK dapat diawasi dengan baik, DAK dapat bekerja pada sifat persekolahan, lebih mengembangkan administrasi kesejahteraan, dan mengurangi kerugian kerangka kerja (Putra dan Ulupui, 2015).

Jika situasi dengan kemajuan manusia saat ini berada pada batas yang rendah, ini berarti bahwa pelaksanaan peningkatan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan pertimbangan khusus mengenai penggantian waktu yang hilang. Jika kemajuan manusia suatu ruang berada pada standar yang tinggi, berarti penyajian peningkatan manusia itu ideal dan harus terus dipertahankan agar sifat SDM itu berguna sehingga memiliki daya guna yang tinggi sehingga bantuan pemerintah daerah dapat tercapai (Sumiyati, 2011).

Pada penelitian ini memiliki kebaruan didalamnya, seperti terdapat empat variabel independen yang artinya cukup luas untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan kebaruan lainnya pada objek penelitian yang dilakukan yaitu di Provinsi Papua Barat yang dimana pada penelitian terdahulu lebih banyak memilih objek penelitian di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya. Karena Indonesia akan menikmati bonus demografi tahun 2030, maka kualitas SDM di Indonesia seharusnya dibuat merata semua baik di provinsi-provinsi yang memiliki peluang bisnis yang tinggi contohnya DKI Jakarta dan Jawa Barat maupun provinsi yang tidak memiliki peluang bisnis sama sekali contohnya seperti Provinsi Papua Barat ini. Agar bonus demografi tersebut dapat dimaksimalkan, maka kualitas SDM yang ada di provinsi-provinsi lain juga harus diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul

“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat Periode 2015-2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap IPM di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh APS (Angka Partisipasi Sekolah) terhadap IPM di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap IPM di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap IPM di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh APS terhadap IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang pertanyaan di atas, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak dan organisasi terkait, antara lain:

1. Secara teoritis

Eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam perenungan yang diidentikkan dengan pertanyaan penelitian, khususnya Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Papua Barat.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Papua Barat, eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pemikiran untuk pengaturan perbaikan provinsi.
- b) Sebagai bahan referensi dan data untuk eksplorasi tambahan oleh semua perkumpulan ujian terkemuka.